

PERSPEKTIF GENDER PADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH

Chahayu Astina
Fakultasi Ekononi dan Bisnis Islam IAIN Langsa
Chahayu.astina@iainlangsa.ac.id

Abstract

This study aims to find out the perspective of the people in Banda Aceh regarding gender relations and to find out how the implementation of gender relations in the household life of the community in Banda Aceh City. The theory that forms the basis of this research is Bourdieu's theory which views power in the context of the theory of society, where he sees power as a culture and artificial symbolism which is continually legitimized through agent interaction and structure. The main way this happens is through what is called "habitus" or socialized norms or tendencies to guide behavior and thinking. This research was conducted through a qualitative approach with data collection techniques carried out by observation and interviews. The results of this study are gender perspectives on the people of Banda Aceh City, especially those who are considered to have higher education (Strata one and two) can be well understood. even though it turns out that there are still those who place the freedom of role for women to choose their desire to work outside the home or become fully housewives without increasing the purpose of freedom of work for women to become the second backbone in household finance. Helping wives to complete domestic work is not a taboo thing for them, but for some they still have an understanding that domestic work is entirely the responsibility of a wife.

Keywords: *Community Perspective, Gender Relations, Banda Aceh City*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat di Banda Aceh tentang relasi gender dan untuk mengetahui bagaimana implementasi relasi gender dalam kehidupan rumah tangga masyarakat di Kota Banda Aceh. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori Bourdieu yang memandang kekuasaan dalam konteks

teori masyarakat, dimana ia memandang kekuasaan sebagai budaya dan simbolisme artifisial yang terus dilegitimasi melalui interaksi dan struktur pelaku. Cara utama ini terjadi adalah melalui apa yang disebut "habitus" atau norma atau kecenderungan yang disosialisasikan untuk memandu perilaku dan pemikiran. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah perspektif gender pada masyarakat Kota Banda Aceh khususnya yang dianggap berpendidikan tinggi (Strata satu dan dua) dapat dipahami dengan baik. Padahal ternyata masih ada yang menempatkan kebebasan peran bagi perempuan untuk memilih keinginannya bekerja di luar rumah atau menjadi ibu rumah tangga seutuhnya tanpa meningkatkan tujuan kebebasan bekerja agar perempuan menjadi tulang punggung kedua dalam keuangan rumah tangga. Membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah tangga bukanlah hal yang tabu bagi mereka, namun bagi sebagian mereka masih memiliki pemahaman bahwa pekerjaan rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang istri.

Kata Kunci: *Perspektif Masyarakat, Relasi Gender, Kota Banda Aceh*

Pendahuluan

Gender menurut Baron (2000:188) merupakan sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Sedangkan Santrock (2002:365) mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu kepada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan gender adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Kajian isu gender sudah ada sejak 10 bahkan 20 tahun yang lalu yang dapat dilihat dengan adanya literatur-literatur dari berbagai disiplin ilmu sehingga menghasilkan berbagai konsep dan teori tinjauan mengenai gender.

Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Seringkali orang mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (tidak berubah) dengan yang bersifat non-kodrati (gender) yang bisa berubah dan diubah. Perbedaan peran gender ini juga menjadikan orang berpikir kembali tentang pembagian peran yang dianggap telah melekat, baik pada perempuan maupun laki-laki.

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Walaupun demikian, masih ada persepsi gender disamakan dengan jenis kelamin (seks). Perbedaan jenis kelamin ditentukan secara biologis, yang melekat secara fisik sebagai alat reproduksi. Oleh sebab itu, seks merupakan kodrat atau ketentuan dari Allah SWT sehingga bersifat permanen dan universal.

Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi dan kemasyarakatan (domestik). Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan (publik).

Dalam masyarakat tradisional-patriarkhi dapat dilihat dengan jelas adanya pemisahan yang tajam bukan hanya pada peran gender tetapi juga pada sifat gender. Misalnya, laki-laki dituntut untuk bersifat pemberani dan gagah perkasa sedangkan perempuan harus bersifat lemah lembut dan penurut. Padahal, laki-laki maupun perempuan adalah manusia biasa, yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dibawanya sejak lahir. Sifat lemah lembut, perasa, pemberani, penakut, tegas, pemalu dan lain sebagainya, bisa ada pada diri siapapun, tidak peduli apakah dia perempuan atau laki-laki. Akan tetapi, konstruksi sosial di masyarakat merubah pandangan 'netral' pada sifat gender tersebut.

Tidak sedikit orang yang masih berpikir bahwa membicarakan kesetaraan gender adalah sesuatu yang mengada-ada. Hal yang terlalu dibesar-besarkan. Kelompok orang yang berpikir konservatif seperti ini menganggap bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun dalam masyarakat memang harus berbeda. *'Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, percuma menghabiskan biaya saja, toh nantinya akan kembali juga masuk dapur'* Pernah mendengar ungkapan seperti itu? Hal ini masih sering terlontar saat dipertanyakan apakah anak perempuan atau laki-laki yang akan diberikan kesempatan untuk meneruskan sekolah.

Kesetaraan gender belum sepenuhnya dapat terwujud karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarkis. Nilai-nilai ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Selain itu kurang tepatnya pemahaman ajaran agama sering menyudutkan posisi perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

Kesetaraan gender memberikan pilihan, peluang dan kesempatan tersebut sama besarnya pada perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender terjadi dalam lingkup kegiatan sehari-hari dapat diilustrasikan secara sederhana misalnya

yang terjadi pada dua keluarga: pertama, adalah seorang istri yang memilih bekerja di rumah dan suaminya memilih bekerja buruh di pabrik. Pada saat mengambil keputusan di keluarga, istri bebas menentukan apakah dia ingin bekerja di luar atau di dalam rumah. Demikian juga sang suami tidak keberatan untuk bertukar peran jika suatu saat istrinya mempunyai kesempatan bekerja di pabrik. Kesetaraan gender tercipta manakala istri dan suami mempunyai peluang yang sama untuk memilih jenis pekerjaan yang disukainya dan mempunyai posisi yang sama saat mengambil keputusan dalam keluarga. Kedua, adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai pengacara. Orang menganggap dia sudah sadar gender, berpikiran modern dan sudah menikmati kesetaraan gender dalam keluarganya. Penampilannya yang tegas dan gaya bicaranya lantang di depan publik, seolah-olah telah menghapus bayangan *stereotype* perempuan tradisional. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah dia tidak memilih pekerjaan menjadi pengacara, melainkan terpaksa menjadi pengacara karena suaminya seorang pengusaha yang menginginkan sang istri menangani urusan-urusan hukum dengan klien-klien bisnisnya. Sang istri selalu bekerja dibawah tekanan suami, tidak mempunyai kebebasan mengeluarkan pendapatnya dan tidak mempunyai kesempatan untuk memilih pekerjaan lain yang diinginkannya. Publik seringkali membuat dan menilai sesuatu hanya dari penampakan luarnya saja. Demikian pula halnya dengan kesetaraan gender. Orang sering menghubungkan kesetaraan gender dengan jenis pekerjaan yang dilakukan khususnya oleh perempuan. Namun, melihat contoh kedua keluarga di atas, jelas bagi kita bahwa jenis pekerjaan seseorang ataupun tempat bekerja yang dipilih oleh seseorang bukanlah ukuran yang dapat menunjukkan adanya kesetaraan gender.

Inti dari kesetaraan gender adalah menganggap bahwa semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar (*equality*), baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang mereka berkuasa, merasa lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari pihak lainnya. Singkatnya, inti dari kesetaraan gender adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama di dalam pengambilan keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dari lingkungan. Sehingga tercapita sebuah keseimbangan yang diharapkan dapat membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Penomorduaan atau subordinasi pada dasarnya adalah perbedaan perlakuan terhadap salah satu identitas sosial, dalam hal ini adalah terhadap perempuan. Cukup adil rasanya bahwa dalam kultur budaya kita di Indonesia, perempuan masih dinomorduakan dalam banyak hal, terutama dalam pengambilan keputusan. Suara perempuan dianggap kurang penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan umum. Akibatnya, perempuan tidak dapat mengontrol apabila keputusan itu merugikan

mereka dan tidak bisa ikut terlibat maksimal saat hasil keputusan tersebut diimplementasikan.

Begitupun dalam peran sosial-ekonomi yang dipandang layak oleh suatu masyarakat untuk di berikan kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki sering diberi peran pencari nafkah, sementara wanita berperan ganda yaitu bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah, pencari nafkah tambahan, dan aktif dalam kegiatan masyarakat.

Dalam masyarakat Aceh pemahaman relasi gender sepertinya menurun dibandingkan beberapa ratus tahun yang lalu (Hasjmy, 1976:24-25). Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, belum ada satupun nama perempuan di Aceh yang berhasil menyandang harumnya nama seperti para pemimpin perempuan pendahulunya. Padahal saat ini, akses pendidikan bagi perempuan Aceh lebih besar. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin Provinsi Aceh Tahun 2012-2013

| Kelompok Umur | 2012 | | | 2013 | | |
|---------------|---------------------------|-----------|-------|---------------------------|-----------|-------|
| | Angka Partisipasi Sekolah | | | Angka Partisipasi Sekolah | | |
| | Laki-Laki | Perempuan | Total | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 16-18 | 69.88 | 79.26 | 74.44 | 71.98 | 77.29 | 74.60 |
| 13-15 | 93.61 | 95.18 | 94.41 | 94.04 | 96.30 | 95.20 |
| 7-12 | 99.36 | 99.34 | 99.35 | 99.63 | 99.70 | 99.66 |

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Pengakuan masyarakat tentang eksistensi perempuan secara sosial dan ekonomi telah diakui (Wawancara masyarakat Aceh). Sulitnya ditemui pemimpin dari kalangan perempuan (Data SKPA/Kepala Dinas dalam beberapa tahun terakhir) mengindikasikan adanya pemahaman mengenai relasi gender yang bergeser. Seperti contoh yang telah diuraikan di atas, meningkatnya partisipasi perempuan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat belum tentu didasarkan pada kebebasan memilih.

Adanya faktor-faktor yang membuat bergesernya pemahaman mengenai relasi gender dalam sosial ekonomi masyarakat Aceh membuat peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai "PERSPEKTIF GENDER DALAM MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH". Adapun alasan peneliti mengambil Kota Banda Aceh sebagai sampel karena sebagai ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh dianggap mampu mewakili kultur dan kehidupan keseharian masyarakat Aceh.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perspektif masyarakat di Kota Banda Aceh mengenai relasi gender dan implementasi relasi gender pada kehidupan rumah tangga masyarakat di Kota Banda Aceh.

Irwan Abdullah (2003) dalam penelitiannya yang berjudul "Penelitian Berwawasan Gender Dalam Ilmu Sosial" menyarankan beberapa hal, pertama, penelitian tentang perempuan atau gender sebaiknya menekankan pada cakupan yang terbatas (mikro) untuk memungkinkan pemahaman mendalam

dilakukan. Oleh karena itu, penelitian mengarah pada analisis tentang satu keluarga, seorang ibu hamil, tiga perempuan karir, pengalaman seseorang yang mengalami *trafficking*, hubungan pendidikan dengan profesi lima perempuan, atau sekelompok perempuan yang memberikan pemahaman mendalam atas realitas perempuan dan hubungan-hubungan kekuasaan. Kedua, sangat perlu dilakukan analisis secara lebih komprehensif sehingga diperoleh pemahaman yang utuh (menyeluruh). Ketiga, perlu dilakukan perbandingan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan teruji. Dengan perbandingan akan dimungkinkan diperoleh pemahaman yang mendalam dan utuh tentang realitas sosial kaum perempuan. Namun, perbandingan pada tingkat ini membutuhkan payung teori yang cukup membuka ruang pada keberpihakan. Tanpa keberpihakan dalam pemilihan kerangka teori, suatu penelitian gender tidak pernah menghasilkan sesuatu untuk kaum perempuan sendiri karena ia kembali tersubordinasi oleh orientasi teoritis yang memiliki beban historis dan ideologi untuk pelestarian kekuasaan.

Andi Anirah (2012) dalam artikelnya yang berjudul “Peran Strategis Perempuan Dalam Masyarakat” yang berpendapat bahwa adanya kesetaraan hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki yang sama dan setara, berhak menerima perlakuan yang baik dari masyarakat dan berkewajiban menciptakan masyarakat yang sehat. Dalam kajian ini di satu sisi peneliti mendukung relasi gender dalam sosial ekonomi kemasyarakatan. Tetapi di sisi yang lain, berlandaskan spiritualitas (keagamaan) perempuan mempunyai tugas utama sebagai seorang istri dan ibu. Di sini peneliti berusaha untuk mengintervensi hak memilih perempuan dalam kehidupan sosial ekonominya dengan berdalih agama, bahwa Islam menganjurkan agar aktifitas perempuan di luar rumah tidak sampai mengorbankan tugas utama sebagai seorang istri dan ibu. Penelitian ini tidak menyinggung bagaimana laki-laki seharusnya menjalankan peran sebagai seorang suami dan ayah.

Indah Andiah (2013) artikelnya yang berjudul “Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat” menemukan dari beberapa sampel penelitiannya yaitu para mahasiswa ternyata belum banyak yang mengetahui peran-peran perempuan dalam masyarakat. Dalam penulisannya juga disebutkan 8 *Millenium Development goals* (MDGs) yang harus dipenuhi pada tahun 2015 yang salah satu pointnya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Menurut Indah Andiah, hingga tahun 2015 pencapaian tersebut belum terlihat mencerminkan karena masih banyak perempuan yang belum tersentuh kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hasil penelitian Indah Andiah menemukan bahwa peran perempuan dalam masyarakat tergantung pada budaya masyarakat di mana ia tinggal. Dari sudut pandang peran antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama melaksanakan peran dalam ranah domestik, publik dan sosial akan tetapi dalam kenyataannya peran domestik lebih banyak ditanggung oleh perempuan.

Sri Lestari Wahyuningroem (2005) dalam makalahnya yang berjudul “Peran Perempuan dan Era Baru di Nangroe Aceh Darussalam” membahas tentang Pemerintah Indonesia yang memberikan otonomi khusus kepada masyarakat Aceh dan memberikan kewenangan khusus untuk mengimplementasikan syariat Islam setelah Aceh mengalami konflik yang berkepanjangan dengan pemerintah pusat. Begitupun pada perempuan Aceh, implementasi syariat Islam menciptakan peraturan yang diskriminatif seperti pemaksaan memakai jilbab dan memberlakukan jam malam pada mereka.

Shara Razavi (2007) dalam penelitiannya yang berjudul *The Political and Social Economy of Care in a Development Context: Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options* menyimpulkan bahwa Perawatan (apakah dibayar atau tidak dibayar) sangat penting untuk kesejahteraan manusia dan pola ekonomi pembangunan. Beberapa analisis menekankan pentingnya perawatan untuk dinamisme ekonomi dan pertumbuhan. Orang lain melihat perawatan dalam hal yang jauh lebih besar, sebagai bagian dari struktur masyarakat dan integral perkembangan sosial.

Nurul Huda, Aliyah, Pujiati dan Sumarno (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Model Penelitian Perspektif Gender” yang bertujuan untuk 1. Menggambarkan dan merancang prosedur pengembangan model penelitian berspektif gender, 2. Mengembangkan dan menghasilkan model penelitian berspektif gender, dan 3. Menghasilkan karakteristik model penelitian berspektif gender. Penelitian ini mendapatkan hasil: 1. Pengembangan model penelitian berspektif gender dilakukan dengan mengadaptasi model penelitian dan pengembangan yang dikemukakan oleh Borg dan Gall, 2. Menemukan model penelitian berspektif gender yang secara spesifik menggunakan analisis gender model HARMOS (modifikasi dari analisis gender model Harvard dan Model Moser) dan pedoman aplikasinya, 3. Menghasilkan karakteristik model penelitian berspektif gender.

Nurlian dan Harmona Daulay (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD)” yang memfokuskan pada delapan keluarga petani ladang. Hasil penelitian ini yaitu tidak terjadi pembakuan peran gender pada suami-istri petani ladang dalam pola pembagian kerja, yang mana keduanya dapat melakukan peran yang sama, seperti halnya laki-laki bisa melakukan pekerjaan domestik dan perempuan bisa melakukan pekerjaan publik. Pengaburan nilai pembagian kerja ini terbentuk berdasarkan nilai-nilai sikap yang harmonis, musyawarah, dan saling menghargai sesama manusia. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya lahir karena didukung oleh faktor-faktor: 1. berdasarkan nilai-nilai agama Islam yang egaliter terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, 2. faktor budaya masyarakat petani ladang dalam mendukung terjadinya keseimbangan pembagian kerja

dalam keluarga petani ladang tersebut, dan 3. nilai-nilai gender yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang menetap di Desa Cot Rambong.

Dari beberapa kajian pustaka di atas, peneliti belum menemukan adanya kajian pustaka yang meneliti tentang bagaimana pandangan dan pemahaman relasi gender dalam masyarakat dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi relasi gender dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilaksanakan agar menjadi suatu informasi yang berguna khususnya pada struktur sosial ekonomi masyarakat Aceh.

Landasan Teori

Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini yaitu teori Bourdieu yang memandang kekuasaan dalam konteks teori masyarakat, di mana ia melihat kekuasaan sebagai budaya dan simbolis dibuat, dan terus-menerus kembali dilegitimasi melalui interaksi agen dan struktur. Cara utama ini terjadi adalah melalui apa yang disebutnya 'habitus' atau norma disosialisasikan atau kecenderungan perilaku panduan dan berpikir (Jenkins 2010:106).

Habitus adalah kebiasaan masyarakat yang melekat pada diri seseorang dalam bentuk disposisi abadi, atau kapasitas terlatih dan kecenderungan terstruktur untuk berpikir, merasa dan bertindak dengan cara determinan, yang kemudian membimbing mereka (Navano, 2015). Jadi Habitus tumbuh dalam masyarakat secara alami melalui proses sosial yang sangat panjang, terinternalisasi dan terakulturasi dalam diri masyarakat menjadi kebiasaan yang terstruktur secara sendirinya. Habitus dibuat melalui proses sosial, bukan individu yang mengarah ke pola yang abadi dan ditransfer dari satu konteks ke konteks lainnya, tetapi yang juga bergeser dalam kaitannya dengan konteks tertentu dan dari waktu ke waktu. Habitus tidak tetap atau permanen, dan dapat berubah di bawah situasi yang tak terduga atau selama periode sejarah panjang (Navano, 2015).

Bourdieu dalam bukunya juga mengatakan bahwa Habitus bukanlah hasil dari kehendak bebas atau ditentukan oleh struktur, tapi diciptakan oleh semacam interaksi antar waktu: disposisi yang keduanya dibentuk oleh peristiwa masa lalu dan struktur, dan bentuk praktik dan struktur saat ini dan juga, penting, bahwa kondisi yang sangat persepsi kita ini (Pierre 1996:170). Dalam pengertian ini habitus dibuat dan direproduksi secara tidak sadar.

The habitus is not only a structuring structure, which organizes practices and the perception of practices, but also a structured structure: the principle of division into logical classes which organizes the perception of the social world is itself the products of internalization of the division into social classes .

Aplikasi dari konsep Habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu bisa kita lihat dengan beberapa contoh kasus dimasyarakat. Misalnya dalam budaya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa. Kita mungkin mengenal dengan budaya patrimonial, dimana ketundukan seorang rakyat pada raja

(penguasa). Tabu bagi masyarakat Jawa untuk menentang segala titah raja, kebiasaan ini sudah melekat dalam tradisi masyarakat Jawa. Dimana pemimpin (raja, penguasa, pemerintah) meruapakan titisan Tuhan di muka bumi. Budaya patrimonial ini bisa dilihat pada masa pemerintahan orde baru dengan sistem pemerintahan yang otoriter. Semua struktur pemerintahan terpusat dibawah tampuk komando Soeharto, segala titah Soeharto harus dilaksanakan. Budaya “bapakisme” atau asal bapak senang sudah terinternalisasi selama 32 tahun masa pemerintahan Soeharto, terutama dalam tubuh birokrasi di Indonesia, yang mungkin dewasa ini kita masih bisa merasakannya.

Selain itu, contoh lainnya adalah budaya “Patriarki” atau kedudukan perempuan dalam struktur sosial masyarakat. Dalam adat budaya timur, khususnya Indonesia, perempuan selalu menjadi subordinat dari laki – laki dalam berbagai hal. Posisi subordinat dalam masyarakat ini terbentuk secara alami dan terinternalisasi dalam waktu yang lama. Sehingga sudah menjadi asumsi umum bahwa perempuan berada dibawah laki-laki. Seaktif apapun peranan perempuan diluar baik dalam berbagai ranah seperti politik, bisnis, hukum, maupun ekonomi, saat kembali ke rumahnya tetap kedudukan perempuan menjadi istri rumah tangga, laki – laki yang menjadi pemimpin keluarga. Ini menjadi kebiasaan dalam kultur masyarakat Indonesia, dimana tabu bagi perempuan untuk melakukan tugas laki-laki, termasuk dalam terjun dalam arena politik.

Dominasi simbolik adalah penindasan dengan menggunakan simbol-simbol. Penindasan ini tidak dirasakan sebagai penindasan, tetapi sebagai sesuatu yang secara normal perlu dilakukan. Artinya, penindasan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang ditindas itu sendiri (Wattimena 2015). Misalnya seorang istri yang tidak dapat membela diri, walaupun telah dirugikan oleh suaminya, karena ia, secara tidak sadar, telah menerima statusnya sebagai yang tertindas oleh suaminya.

Namun konsep dominasi simbolik (penindasan simbolik) juga dapat dengan mudah dilihat dalam konsep sensor panopticon. Sensor *panopticon* adalah konsep yang menjelaskan mekanisme kekuasaan yang tetap dirasakan oleh orang-orang yang dikuasai, walaupun sang penguasa tidak lagi mencurahkan perhatiannya untuk melakukan kontrol kekuasaan secara nyata.

Mekanisme dominasi simbolik nantinya memuncak pada pemikiran Bourdieu tentang doxa. Secara singkat, doxa adalah pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasa. Pandangan penguasa itu biasanya bersifat sloganistik, sederhana, populer, dan amat mudah dicerna oleh rakyat banyak, walaupun secara konseptual, pandangan tersebut mengandung banyak kesesatan (Wattimena 2015).

Doxa menunjukkan, bagaimana penguasa bisa meraih, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaannya dengan mempermainkan simbol yang berhasil memasuki pikiran yang dikuasai, sehingga mereka kehilangan sikap

kritisnya pada penguasa. Pihak yang dikuasai melihat dirinya sama dengan penguasa. Mereka ditindas, tetapi tidak pernah merasa sungguh ditindas, karena mereka hidup dalam doxa.

Sex (Jenis Kelamin Biologis)

Konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, pada perbedaan tubuh antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dikemukakan oleh Moore dan Sinclair “*Sex reffers to biological differencer between man and woman, the result of differences in the chromosomes of the embryo*”. Definisi konsep seks tersebut menekankan pada perbedaan yang disebabkan perbedaan kromosom pada janin (Kamanto, 2004:103). Jenis kelamin bersifat biologis dan dibawa sejak lahir sehingga tidak dapat di ubah. Sebagai contoh: hanya perempuan yang dapat hamil dan hanya laki-laki yang menjadikan perempuan hamil.

Seks adalah karakteristik biologis seseorang yang melekat sejak lahir dan tidak bisa diubah kecuali dengan operasi. Alat-alat tersebut menjadi dasar seseorang dikenali jenis kelaminnya sebagai perempuan atau laki-laki. Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan; sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini maka dikatakan bahwa seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun, kumis, janggut, dan memproduksi sperma. Sementara seseorang disebut berjenis kelamin perempuan jika ia mempunyai vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, memiliki alat untuk menyusui (payudara) dan mengalami kehamilan dan proses melahirkan. Ciri-ciri secara biologis ini sama di semua tempat, di semua budaya dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Gender (Jenis Kelamin Sosial)

Menurut Giddens konsep gender menyangkut tentang “*Psychological, social and cultural differences between males and females*”, yaitu perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan (Giddens, 2011:158).

Macionis mendefinisikan gender sebagai “*the significance a society attaches to biological cathegories of female and male*”, yaitu arti penting yang diberikan masyarakat pada kategori biologis laki-laki dan perempuan (Macionis, 1997:240). Laswell menafsirkan gender sebagai “*The knowledge and awareness, whether concious pr unconcious, that one belong to one sex and not to the other*”, yaitu pada pengetahuan dan kesadaran, baik secara sadar ataupun tidak bahwa

seseorang tergolong dalam suatu jenis kelamin tertentu dan bukan dalam jenis kelamin lain (Lasswell, 1987:51).

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Secara etimologis kata 'gender' berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'jenis kelamin' (Echols & Shadily, 2000:265). Kata 'gender' bisa diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku' (Neufeldt, 1984: 561).

Secara terminologis, 'gender' bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips, 1993:4). Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Eliane, 1989:3). Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin, 2001:34). Lebih tegas lagi disebutkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2003:4).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama sama dengan sex, yaitu jenis kelamin (Echols & Shadily, 2000:517). Secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang. Sejarah perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan

menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.

Gender Dan Pendidikan

Dalam berbagai lapisan masyarakat dapat kita jumpai nilai dan aturan agama ataupun adat kebiasaan yang tidak mendukung bahkan melarang keikutsertaan wanita dalam pendidikan formal. Ada nilai yang mengemukakan bahwa "wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga". Ada yang mengatakan bahwa wanita harus menempuh pendidikan yang dianggap oleh orang tuanya sesuai dengan kodrat wanita dan ada yang berpandangan bahwa "seorang gadis sebaiknya menikah pada usia muda agar tidak menjadi perawan tua". Atas dasar nilai dan aturan demikian yang ada pada masyarakat yang mengizinkan wanita bersekolah tapi hanya sampai pada jenjang tertentu atau dalam jenis pendidikan tertentu saja. Ada pula masyarakat yang sama sekali tidak membenarkan anak gadisnya untuk bersekolah. Sebagai akibat ketidaksamaan kesempatan demikian maka banyak dalam masyarakat dijumpai ketimpangan angka partisipasi pendidikan formal. Prestasi akademik maupun motivasi belajar sering bukan merupakan penghambat partisipasi wanita, karena siswi yang berprestasi pun sering tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Gender Dan Pekerjaan

Apabila seseorang membahas pekerjaan yang dilakukan wanita, maka yang dibayangkan mungkin hanyalah pekerjaan yang dijumpai di ranah publik: pekerjaan di tempat kerja formal seperti pabrik dan kantor dan pekerjaan dalam perekonomian formal. Pada umumnya orang melupakan bahwa di rumahpun wanita sering melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Ada yang menawarkan berbagai jenis jasa, ada yang melakukan perdagangan eceran, memproduksi hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan maupun produk lain yang dipasarkan.

Moore and Sinclair mendefinisikan dua macam segregasi jenis kelamin dalam angkatan kerja yaitu segregasi vertikal dan segregasi horizontal. Segregasi vertikal mengacu pada terkonsentrasinya pekerjaan wanita pada jenjang rendah pada organisasi, seperti misalnya jabatan pramuniaga, sales promotion girl, pramusaji, tenaga kebersihan, pramugari, pengasuh anak, sekretaris, kasir, dan sebagainya. Sedangkan segregasi horizontal mengacu pada kenyataan bahwa pekerjaan wanita sering terkonsentrasi pada jenis pekerjaan yang berbeda dengan jenis pekerjaan laki-laki, memberi kesan seakan-akan jenis pekerjaan tertentu relatif tertutup bagi kaum wanita seperti misalnya di bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi (Kamanto, 2004:115).

Pengertian Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif yaitu 1. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya); 2. Sudut pandang; pandangan (<http://kbbi.web.id/perspektif>.) Menurut Summatmadja dan Winardi (1999) perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah. Perspektif juga merupakan cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya (Suhanadji dan Waspodo. 2004).

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Perspektif dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Sehingga perspektif memiliki ciri-ciri antara lain: pertama, seseorang yang memiliki perspektif yang tinggi akan berpikir luas dan tidak membedakan sesuatu. Jadi, tidak memandang masalah dari pandangan sempit dan terkotak-kotak. Kedua, seseorang yang memiliki perspektif yang tinggi akan dengan mudah dapat berinteraksi dengan orang lain secara harmonis. Ketiga, seseorang yang memiliki perspektif yang tinggi akan mampu bersaing atau berkompetensi dengan sehat.

Gender adalah konstruksi dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya (Eviota, 1992). Berawal dari istilah tersebut kemudian munculah paham mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya. Peran secara gender, dibedakan dari kodrati yaitu peran yang didasarkan pada kodrat. Peran gender sebagai peran yang ditetapkan secara budaya terbuka untuk dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, sementara peran kodrati seperti mengalami haid, hamil, melahirkan, dan menyusui pada perempuan adalah peran yang tidak dapat dipertukarkan karena sudah demikian sejak diciptakannya. Istilah gender mengacu pada makna sosial, budaya, dan biologis. Peran gender bisa berubah karena dipengaruhi oleh ideologi, ekonomi, adat, agama, dan sosial budaya, etnik, waktu, tempat, dan kemajuan iptek. Perubahan sosial yang selama ini bersifat androsentris, dapat dilihat sebagai ketimpangan structural dalam perspektif gender (Susanti, 2000:14). Berdasarkan pada pemahaman tersebut kemudian muncul aksi perempuan diberbagai kegiatan kemasyarakatan.

Perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dibedakan secara kodrati, dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya. Perbedaan gender akan menjadi masalah jika perbedaan itu mengakibatkan ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan. (Susanti, 2000:14)

Penutup

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan format deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat membuat kesimpulan jika perspektif gender dalam masyarakat Aceh yang berpendidikan dapat dipahami dengan baik. Walaupun ternyata, masih ada yang “mengkotak-kotakkan” peran gender pada jenis kelamin. Hal tersebut didasari oleh cara pemahaman penafsiran agama secara patriarkal. Walaupun banyak sejarah di Aceh yang membuktikan bahwa perempuan-perempuan Aceh banyak yang menjadi pemimpin sukses, ternyata tidak menjadi acuan sepenuhnya bagi perempuan-perempuan Aceh masa kini dalam membuat keputusan. Keputusan masih didasari pertimbangan mengurus pekerjaan domestik yang lebih mayoritas daripada mengembangkan diri sepenuhnya di luar rumah.

Namun, untuk masa sekarang laki-laki di Kota Banda Aceh lebih memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk memilih keinginannya bekerja di luar rumah atau menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya tanpa menambah tujuan dari kebebasan bekerja perempuan agar bisa menjadi tulang punggung kedua dalam keuangan rumah tangga. Membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan domestik merupakan hal yang tidak tabu bagi mereka, akan tetapi bagi sebagiannya tetap mempunyai pemahaman bahwa pekerjaan domestik sepenuhnya merupakan tanggung jawab seorang istri.

Daftar Pustaka

- Abdullah. 2003. Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Humaniora. Volume XV, Nomor 3.*
- Ahdiah. 2013. Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat. *Jurnal Academica Fisip Untad Vol 05 No.2 Oktober 2013. ISSN 1411-3341.*
- Anirah. 2012. Peran Strategis Perempuan Dalam Masyarakat. *Jurnal STAIN Datokrama, Palu*
- Bourdieu. Pierre. 1996. *Distinction : a social critique of the judgement of taste*, Cetakan ke-8, translated by Richard Nice, Cambridge, Harvard University Press, hal 170.
- BPS Provinsi Aceh (<http://aceh.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/66>)
- Eviota, Elizabeth. 1992. *The Political Economy of Gender*. London: Zed Books, Ltd.
- Harold D. Lasswell. 1987. *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. College Park, Maryland: University of Maryland Press.
- Hasjmy. Sejarah Kebudayaan Islam.
- Hilary M. Lips. 1993. *Sex & Gender: An Introduction*. (London: Mayfield Publishing Company).
- Jenkins, Richard. 2010. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu (Penerjemah Nurhadi)*. Penerbit Kreasi Wacana, Bantul, Hal 106.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia.